

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. PT Incasi Raya yang merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan telah memberikan APD yang cukup untuk para pekerja, namun dari segi pengawasan terhadap pekerja di kebun, perusahaan tidak memberikan bentuk-bentuk keselamatan kerja seperti pengawasan yang cukup terhadap pengawasan kegiatan para pekerja, hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus kecelakaan kerja yang terjadi bahwa masih ditemukan ada kecelakaan kerja yang dialami oleh salah satu pekerja akibat lalainya para pengawas dalam menjalankan tugas, serta dalam hal pengecekan terhadap APD tidak dilakukan oleh PT Incasi Raya sehingga masih ada ditemukannya kacamata yang rusak dan sudah tidak layak pakai sehingga norma-norma keselamatan yang diharapkan pada perusahaan masih belum terpenuhi.
2. Dalam kenyataannya PT Incasi Raya memang telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap para pekerjanya sehingga terjadi kasus kecelakaan kerja. Seharusnya perusahaan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 15 Undang-Undang tersebut menetapkan bagi yang melanggar ketentuan yang telah diatur dapat diancam pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000, selanjutnya Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berupa sanksi administratif terhadap pelanggaran manajemen K3 yaitu teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, pencabutan izin.

B. Saran

1. Diharapkan PT. Incasi Raya dapat memperhatikan SDM yang diperlukan, karena pengawasan sangat penting agar proses suatu panen dapat berjalan lebih baik dan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan SOP perusahaan dapat berjalan dengan baik, dan juga PT Incasi Raya dapat melaksanakan pengecekan terhadap APD yang diberikan kepada para pekerja secara berkala, sehingga kerusakan APD dapat diminimalisir dan para pekerja dapat merasa aman dalam melakukan pekerjaannya. Perlu diberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada pekerja untuk meminimalisir kecelakaan kerja.
2. Akibat hukum yang diterima perusahaan masih belum terlaksana dengan baik, dilihat dari segi sanksi penulis berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hanya memberi sanksi administratif terhadap pelanggaran manajemen kesehatan dan keselamatan yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, sedangkan terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan para pekerja masih dinilai belum cukup, sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dinilai belum cukup efektif karena sanksi yang diberikan masih

terlalu ringan dan juga Undang-Undang tentang keselamatan dan kesehatan kerja harus diperbaharui mengingat Undang-Undang ini sudah terlalu lama karena keselamatan kerja merupakan aspek penting dalam terjalinnya suatu hubungan kerja.

